

**BEKERJANYA POLITISASI IDENTITAS PADA
PILKADA SUMUT 2018
(MENAKAR PENGARUH ISU AGAMA
TERHADAP KEMENANGAN
EDY RAHMAYADI DAN MUSA RAJEKSHAH)**

Ian Pasaribu

*Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia
ianpasaribu20@gmail.com*

Irfan Prayogi

*Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Irfanprayogi44@yahoo.com*

Abstract

This article will describe what is the winning factor for Edy Rahmayadi and Musa Rajekshah in the 2018 Sumatera Utara contestation of regional elections. The author sees Political Identity greatly influencing the course of democracy in North Sumatra due to differences in religious identity between the two pairs of contesting candidates. The politics of identity centered on the politicization of shared identity is an important base of glue in group collectivity. Identity is then politicized through extreme interpretation to gain support from the majority of the community both in race, ethnicity and religion. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The data collection techniques through interviews as primary data and secondary data in the form of news, journals, books, and documents related to the results of Sumatera Utara 2018 regional elections. Findings from this study, the author saw Edy-Musa utilizing Islamic discourse as a power to obtain votes from Islamic circles. This is evident from the post-election vote acquisition in certain regional bases, as well as the social conditions of the community before the vote. In addition, Islamic discourse is clearly present through banners calling for choosing Muslim leaders, morning prayer in congregation and other identity issues as an

effort to influence people's preferences to make choices on voting. This paper seeks to understand identity politics as a form of popular strategy and the implications that arise in the electoral politics.

Keywords: *Identity politics, religious issues, and winning candidates*

Abstrak

Artikel ini akan menjabarkan apa yang menjadi faktor kemenangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah dalam kontestasi Pilkada Sumatera Utara 2018. Penulis melihat Politik Identitas sangat memengaruhi jalannya pesta demokrasi di Sumut dikarenakan adanya perbedaan identitas agama antara kedua pasang calon yang berkontestasi. Politik identitas berpusat pada politisasi identitas bersama menjadi basis perekat yang penting dalam kolektivitas kelompok. Identitas kemudian dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim untuk mendapat dukungan dari masyarakat mayoritas baik secara ras, etnisitas dan agama. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara sebagai data primer dan data sekunder berupa berita, jurnal, buku, dan dokumen terkait hasil pilkada Sumut 2018. Temuan dari penelitian ini, penulis melihat Edy-Musa memanfaatkan wacana Islam sebagai kekuatan untuk memperoleh suara dari kalangan Islam. Hal ini terlihat dari perolehan suara pasca pemilihan pada basis-basis daerah tertentu, juga kondisi sosial masyarakat sebelum pemungutan suara. Selain itu, wacana Islam hadir dengan jelas melalui spanduk seruan memilih pemimpin muslim, sholat subuh berjamaah dan isu-isu identitas lainnya sebagai upaya memengaruhi preferensi masyarakat untuk menjatuhkan pilihan pada pemungutan suara. Tulisan ini berusaha memahami politik identitas sebagai bentuk strategi populer dan implikasi yang muncul pada gelaran politik elektoral.

Kata kunci: *Isu agama, pemenangan calon, politik identitas*

1. Pendahuluan

Mitologi Yunani kotak pandora bisa dijadikan sebagai metafora realitas perkembangan Indonesia dalam tahun-tahun awal reformasi di Indonesia. Pandora diandaikan sebagai reformasi, yang membuka kotak – selubung otoritarianisme Orde Baru selama lebih dari 32 tahun. Semua keburukan yang pernah dikenal peradaban politik umat manusia kini berhamburan dengan cepat ke permukaan dan menjangkau sembarang orang, sembarang kawasan bahkan sembarang sektor kehidupan masyarakat Indonesia (Lay, 2006:5).

Semenjak reformasi, semua identitas memecah, tersebar dan menyandar kepada kondisi primordial dan teritorial, seperti suku, agama, ras dan antargolongan, bahkan sentimen kedaerahan. Semuanya kembali pulang untuk mencari identitas dan keutuhannya masing-masing sebagai solusi menghadapi keterpecahan identitas pasca Orde Baru (Heryanto, 2010: 43). Reformasi pada akhirnya hanya sebagai jargon gerakan sosial yang membuka keran kebebasan tanpa tawaran konsep yang memadai untuk keberlangsungan bangsa. Modernitas gagasan reformasi menolak otoritarianisme dengan menawarkan konsep kebebasan, ternyata mengalami perkelindanan yang paradoks. Masing-masing identitas kembali pulang keranah primordial dan berimplikasi pada sentimen-sentimen, baik agama maupun suku dalam kontestasi politik.

Desentralisasi politik dan otonomi daerah menjadi poin pendukung masuknya kita – politik Indonesia – ke dalam politik identitas. Politik identitas, mengutip Agnes Heller merupakan “konsep dan gerakan

politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori utama” (Hapsarin, 2007: V). Secara positif, politik identitas memberi sinyal keterbukaan, ruang kebebasan ide, terutama setelah kegagalan narasi besar (*grand narrative*) untuk mengakomodir berbagai kepentingan yang ada. Namun di sisi lain politik identitas menghasilkan eksklusifitas baru dan mengeksklusi perbedaan itu sendiri. Politik identitas dianggap dapat merepresentasikan subjek melalui penggambarannya akan individu terhadap *liyan (the other)* sehingga menjamin eksistensi suatu kelompok maupun individu.

Banyak kalangan yang berpendapat bahwa pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi kontestasi politik yang menarik apabila dijelaskan dalam porsi politik identitas agama dan etnisitas memainkan peranan penting dan ikut andil memengaruhi preferensi politik warga DKI Jakarta yang ditandai dengan kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Walaupun begitu, kekalahan Ahok-Djarot bukan hanya imbas dan stimulus dari sentimen identitas keagamaan maupun etnis semata, tetapi juga terakumulasinya setiap bentuk kekecewaan ekonomi-politik warga DKI atas kepemimpinan Ahok. Artinya – sebagai analisis pembandingan – aspek material tidak dapat dinafikkan dalam membangun citra Ahok sebagai ‘musuh bersama’ bagi masyarakat, terkhusus muslim yang merasa termarginalkan, seperti isu penggusuran, reklamasi, gaya kepemimpinan yang dinilai kasar (melawan simbolik kultural), dan juga lemahnya pendekatan struktural antar lembaga (Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta).

Beberapa bukti menunjukkan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) digunakan oleh kelompok-kelompok dan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan kemenangan pasangan calon tertentu (politik elektoral) seperti bermuculannya komentar, foto-foto, dan video di media sosial yang berupaya memengaruhi preferensi politik warga DKI Jakarta atas dasar sentimen identitas. Atau keberadaan spanduk provokatif, seperti larangan memilih pemimpin yang berbeda agama dan larangan mensholatkan jenazah warga yang mendukung pemimpin yang berbeda agama dengan memengaruhi situasi dan kondisi di tengah-tengah masyarakat walaupun sebetulnya politik identitas sudah ada dan bermain sebelumnya pada gelaran politik elektoral – seperti misalkan pada Pemilihan Legislatif Sumut sebagaimana penelitian Damanik (2015) – tetapi pada kasus Pilkada DKI, preferensi politik identitas hadir sebagai sebuah implikasi atas konstruksi Ahok sebagai *yang-lain* seturut dengan kasus penodaan agama.

Domino efek terjadi pada Pilkada Sumut 2018. Politisasi agama menjadi sangat biasa dilakukan oleh kedua pasang calon yang berkontestasi, yaitu pasangan nomor urut 1: Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah dan nomor urut 2: Djarot Syaiful Hidayat – Sihar Sitorus. Hal ini didukung dengan imajinasi sentimen gerakan Aksi Bela Islam 212 yang terbentuk dan masih terkonstruksi dalam rangka puncak gerakan protes terhadap penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok selaku Gubernur sekaligus petahana nuansa wacana religiusitas begitu terasa menjadi penanda pada kubu Edy-Ijcek

(Eramas) dengan mengkonstruksikan diri dan segala simbol yang digunakan berbasis keagamaan, disamping juga isu kedaerahan. Edy-Ijcek juga diuntungkan oleh sentimen asosiatif yang dilekatkan pada Djarot – yang merupakan pasangan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta – sebagai rivalnya dan mengkondisikan preferensi masyarakat Sumut dengan istilah putra daerah – dimana Djarot bukan warga Asli Sumatera Utara – dan Sihar Sitorus sebagai non-muslim.

Diferensiasi politik berbasis agama sangat memengaruhi kemenangan Eramas. Berkaca dari perolehan Pilkada Sumut, Eramas memperoleh kemenangan dengan jumlah persentase 57,58% (3.291.137 suara), dan untuk Djarot-Sihar (Djoss) memperoleh 42,42% (2.424.960 suara) (Kompas.com: 2018/07/11). Apabila diuji dengan analisis institusi kelembagaan, mesin partai sangat minim memengaruhi pilihan masyarakat memilih kedua kandidat, mengingat timpangnya koalisi yang terbangun diantara keduanya. Eramas merengkuh banyak partai seperti: Gerindra, PKS, Hanura, Nasdem,

Golkar, Perindo, PAN dan yang belakangan yakni Demokrat, dan Berkarya. Sedangkan untuk Djoss hanya didukung oleh dua partai politik yaitu PDIP dan PPP, yang dalam hal Pilkada Sumut, partai berlambang Ka'bah tersebut melakukan manuver politik elit karena ketidaksetujuan ketua DPW terhadap pasangan Djoss yang dianggap pelangi (Islam-Kristen). Maka analisis kelembagaan menjadi tidak relevan untuk mengkaji Pilkada Sumut, karena jumlah dukungan partai tidak berkorelasi langsung dengan perolehan yang hanya berselisih 15,16%. Sedangkan selisih keterwakilan partai di DPRD Sumut adalah 20 persen berbanding 80 persen.

Dalam artikel ini penulis akan mengkaji kemenangan Eramas pada kerangka analisis diskursus (*discourse analysis*) di mana konstruksi sosial berupa kesadaran religiusitas begitu masif didengungkan oleh agen-agen sosial yang diidolakan. Selain itu mengkonstruksikan *liyan* sebagai musuh (*outsider*) dengan melekatkan makna signifikansi kepada aktor tertentu (Ahok) membuat sentimen keagamaan kian muncul dengan dibantu oleh narasi-narasi keagamaan dan dukungan aktor terpercaya. Dalam hal ini Ustadz Abdul Somad (UAS) menjadi aktor menarik menguatkan keyakinan masyarakat bahwa Eramas pantas untuk dipilih oleh warga Sumatera Utara –kami sebut UAS *effect*. Selain UAS, Gatot Nurmantyo, Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto memberikan statemen terkait dukungan kepada pasangan nomor urut 1 tersebut.

2. Pilkada DKI Jakarta dan Implikasi Politik Identitas

Persatuan umat Islam yang tergabung dalam Aksi Bela Islam 212 merupakan peristiwa unik dalam kesejarahan Indonesia. Massa aksi menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dipenjarakan karena dianggap menghina ayat Al-Qur'an dalam pidato kunjungannya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok saat itu menyinggung tentang Surah Al-Maidah ayat 51 yang menyinggung mengenai memilih pemimpin Islam yang dipolitisasi oleh oknum-oknum tertentu. Sebagai seorang identitas minoritas (China dan Kristen) ia hendak melakukan defensif agar dirinya tidak dianggap sebagai asing dimata warga DKI Jakarta. Namun ucapannya tersebut direkam dan

diviralkan, lantas menjadi bomerang buat dirinya hingga menghasilkan gerakan perlawanan agar Ahok dipenjara atas tuduhan penodaan Agama. Umat Islam yang resah menjangkarkan diri pada suatu narasi bernama Aksi Bela Islam 212 menuntut Ahok dipenjarakan.

Kekuatam wacana Islam berhasil membuat Ahok tersingkir dari kursi DKI 1 dalam Pilkada serentak 2017 dan harus menjalani hukuman berupa penjara. Meskipun pada putaran pertama Ahok-Djarot unggul dengan perolehan 43,0 persen disusul oleh Anies-Sandi 39,97 persen dan Agus-Sylvi 17,1 persen tetapi tidak menjaminnnya menang pada putaran berikutnya. Anes-Sandi dan Ahok-Djarot harus bersaing ketat pasca tersingkirnya Agus-Sylvi di putaran pertama. Uniknya, dengan terdegradasinya pasangan Agus-Sylvi, membuat Anies-Sandi unggul pada putaran kedua dengan memperoleh 57,96 persen suara, sedangkan Ahok-Djarot memperoleh 42,04 persen suara. Konstuksi kafir, China, Penista, Asing, Arogan dan diikuti dengan serangkaian Aksi Bela Islam membuat massa pendukung Agus-Sylvi memutuskan untuk lebih memilih Anies ketimbang Ahok – “asal bukan Ahok”. Pilkada DKI Jakarta membuktikan bahwa politik identitas berbasis isu agama sangat relevan dan dimainkan oleh aktor-aktor tertentu untuk mencari dukungan politik.

Apa yang terjadi pada dinamika Pilkada DKI dicoba untuk dikondisikan pada Pilkada Sumut 2018. Konstruksi bahwa masyarakat Sumut harus memilih pemimpin muslim ditampilkan dalam berbagai spanduk yang berisikan keutamaan memilih pemimpin muslim dan larangan memilih pemimpin non muslim. Ditambah dengan gerakan Sholat Subuh Berjamaah yang dilakukan di

banyak mesjid dan musholah di Sumut pada hari pencoblosan dan diikuti dengan tausyiah. Kontestasi wacana di media sosial juga sangat memengaruhi jalannya pesta demokrasi di Sumut, seperti *facebook*, *instagram* dan grup *Whatsapp*. Eramas yang dikonstruksi sebagai duet Religius, kedaerahan dan mengusung *tagline* 'Sumut Bermartabat' berhasil memengaruhi preferensi publik untuk memilih mereka, dengan memanfaatkan sisa-sisa gerakan Aksi Bela Islam dan ingatan publik akan Ahok dengan mengasosiasikannya pada Djarot selaku kontestan Pilkada Sumut sekaligus lawan politik Eramas.

3. Metode Penelitian

Dengan menganalisis proses-proses politisasi identitas berbasis agama dalam pilkada Sumut 2018 yang dimediasi oleh aktor tertentu baik aktor sosial, politik, maupun agama dan masyarakat sipil, pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Wawancara dan studi literatur digunakan untuk menelusuri perkembangan wacana politik identitas yang hadir dalam diskursus publik Sumatera Utara baik pada masa kampanye maupun hari pencoblosan. Pengamatan terhadap berita-berita yang berkaitan dengan isu Pilkada Sumut 2018 dilakukan untuk menggali indikasi-indikasi berlakunya agama sebagai cara memenangkan Eramas. Dalam upaya memberikan gambaran-gambaran mengenai akibat-akibat yang dapat muncul dari politik identitas berbasis agama, studi ini merujuk pada literatur-literatur politik identitas dan Demokrasi yang kemudian dijadikan perspektif untuk memahami gejala-gejala serupa.

4. Perspektif Teori

Politik identitas merupakan bentuk dari pilihan politik yang didasarkan pada logika persamaan dan logika perbedaan (Laclau Mouffe, 2008). Politik identitas lebih kepada sikap politik yang fokus pada sub-kelompok dan merujuk pada aktivisme atau pencarian status yang dilandaskan pada kategori ras, gender, etnisitas, orientasi budaya, dan identifikasi politik lainnya. Isunya pada orientasi politik kelompok sub nasional melihat perbedaan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. di luar itu, politik identitas juga dapat mengacu pada identitas kebangsaan atau identitas diri (*self identity*) yang melintasi batas-batas etnik atau nasionalisme, misalnya isu wanita, imigran dan keagamaan (Warda, 2014). Politik identitas adalah ciri yang tak dapat dihindari dari demokrasi liberal, sebab sistem politik itulah yang memberikan ruang bagi tumbuhnya upaya-upaya kelompok dalam mengartikulasikan kepentingan dan tujuannya. Namun identitas dalam demokrasi memuat masalah lain, karena identitas kelompok lebih bersifat memberi batasan ketimbang memberikan kebebasan individu (Gutmann, 2003).

Preferensi politik dikonstitusikan oleh sebuah garis demarkasi antara '*yang aku*' dengan '*yang bukan aku*' dalam realitas sosial dengan mengoposisikan diri pada *yang lain* diluar diri. Atas dasar itulah penulis akan membedah studi kasus kemenangan Eramas pada kontestasi pilkada Sumut dengan menggunakan analisa diskursus yang dipopulerkan oleh Ernesto Laclau-Chantal Mouffe, dua analisis politik dengan konsentrasi filsafat politik, demokrasi, populisme, dan *Post*

Marxis Theory. Untuk keperluan analisis, penulis hanya akan menggunakan bagian dari perspektif analisa diskursus berupa Hegemoni, Antagonisme, *The Logic of Difference and The Logic of Equivalence*, Mitos, formasi kelompok dan juga imajinasi politik dan akan menariknya dalam porsi politik identitas.

Antonio Gramsci menekankan bahwa hegemoni berhasil ketika kelas penguasa berhasil menyingkirkan kekuatan oposisi, dan memenangkan persetujuan baik secara aktif maupun pasif dari para sekutunya. Menurutnya, subjek dari tindakan politik tidak dapat didefinisikan dengan kelas-kelas sosial, pada saat mereka mencapai bentuk 'keinginan kolektif' yang menciptakan ekspresi politik dari sistem hegemoni yang dikonstruksi oleh ideologi (Simon, 2004:160). Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa hegemoni dalam pemahaman Gramsci adalah mengorganisir persetujuan, dan menjadikan elemen partikular menjadi tatanan universal. Laclau dan Mouffe mendasarkan analisa politik mereka pada teori hegemoni Gramsci. Dengan memfokuskan pada *agen sosial baru*, Laclau mengubah paradigma kelas pada Gramsci menjadi analisa diskursus (Hutagalung, 2008:xxviii).

Laclau dan Mouffe melihat bahwa hegemoni akan muncul dalam situasi antagonisme yang memungkinkan terbentuknya *political frontier*. *Politikcal frontier* menciptakan pertarungan hegemonik dan menghasilkan kesempandangan sekaligus ketidaksepahaman dengan *the other (outsider)* (Laclau Mouffe, 2008: 202). Antagonisme sosial membuat setiap

makna sosial berkontestasi dan saling mengidentifikasi sehingga memunculkan 'kita' dan 'mereka' serta menciptakan *logic* yang disebut logika perbedaan dan logika persamaan (*The logic of difference and the logic of equivalence*) dengan memperluas persepsi (Damanik, 2010: 22). Hegemoni memang hanya bisa terbangun manakala perbedaan lenyap dan menghasilkan persetujuan yang pada akhirnya memutuskan pilihan-pilihan pada kesamaan identitas yang baru terbentuk (Jorgensen dan Philips, 2010: 163)

Untuk membangun hegemoni, maka subjek atau agen sosial membutuhkan apa yang disebut sebagai mitos (*myth*), yang dibutuhkan untuk menguatkan identitas dan meyakinkan kelompok yang sudah terbentuk dalam satu garis demarkasi. *Myth* adalah sebuah prinsip pembacaan satu situasi yang sudah tersedia, di mana istilah-istilahnya bersifat eksternal kepada apa yang bisa direpresentasikan dalam ruang objektif yang bisa dibentuk oleh struktur yang ada. Dengan kata lain, *myth* menyertakan pembentukan satu objektifitas yang baru dengan cara mengumpulkan elemen-elemen sosial yang tercerabut dan terlepas. Proyek hegemonik, sebagai bentuk percontohan praktik politik, yang menyatukan identitas-identitas dan kekuatan-kekuatan politik yang berbeda kedalam proyek bersama atau kehendak bersama, yaitu *social imaginary*. Bagi Laclau formasi kelompok atau identitas kolektif dipahami oleh setiap individu sebagai prinsip yang sama dengan mengurangi kemungkinan-kemungkinan berbeda yang didahului oleh imajinasi sosial kolektif yang bersifat politis.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Mengukur Isu Agama pada Kemenangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah

Isu agama menjadi senjata politik paling ampuh. Pada pilkada serentak 27 juni 2018 yang diikuti oleh 17 Provinsi, 155 Kabupaten dan 39 Kabupaten se-Indonesia, Sumatera Utara termasuk daerah yang melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kontestasi tersebut dimenangkan oleh Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) dengan nomor urut satu, mengalahkan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus (Djoss) dengan nomor urut 2.

Melihat peta kemenangan yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum, Eramas memperoleh 3.291.137 suara (57,58 %) sedangkan Djoss memperoleh 2.423.960 suara (42,42 %). Hal yang menarik adalah bahwa perolehan suara mayoritas didasarkan pada daerah-daerah tertentu. Eramas unggul di hampir semua kawasan pantai pesisir timur meliputi: Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Batubara, Kota Tanjung Balai, Asahan, Labuhanbatu, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidempuan, dan Tapanuli Selatan Sedangkan Djoss menang di semua daerah pesisir pantai barat seperti: Karo, Simalungun, Dairi, Kota Pematang Siantar, Pakpak Barat, Samosir, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Nias dan Nias Selatan. Melihat spesifikasi demografinya, daerah kemenangan Eramas mayoritas beragama Islam, sedangkan Djoss menang pada daerah bermayoritaskan Kristen baik Katolik maupun Protestan (bps.go.id).

Peta Kemenangan Pilkada Sumatera Utara 2018

Kabupaten/Kota	Edy-Musa	Djarot-Sihar
Asahan	224.950	74.333
Batu Bara	124.911	49.252
Dairi	26.956	119.713
Deli Serdang	458.646	250.717
Humbang Hasundutan	4.905	73.915
Karo	23.807	127.513
Kota Binjai	83.229	26.794
Kota Gunungsitoli	7.854	38.399
Kota Medan	551.641	357.377
Kota Padang Sidimpuan	85.930	15.476
Kota Pematangsiantar	41.551	68.604
Kota Sibolga	16.507	19.019
Kota Tanjung Balai	49.288	12.319
Pakpak Bharat	7.518	11.973
Samosir	2.321	54.566
Serdang Bedagal	175.7775	77.115
Simalungun	178.022	194.235
Tapanuli Selatan	93.884	29.474
Tapanuli Tengah	32.592	109.732
Tapanuli Utara	13.178	137.350
Toba Samosir	5.064	75.694
Kota Tebing Tinggi	49.969	21.171
Labuhanbatu	135.109	43.305
Labuhanbatu Selatan	81.779	37.647
Labuhanbatu Utara	102.524	40.668
Langkat	326.043	134.233
Mandailing Natal	162.034	19.900
Nias	5.427	40.629
Nias Barat	6.107	20.532
Nias Selatan	23.534	73.616
Nias Utara	5.761	26.606
Padang Lawas	97.606	19.740
Padang Lawas Utara	86.713	23.343

Apabila berkaca pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damanik (2015) – terkait dengan hasil pemilu legislatif – daerah pantai timur banyak memenangkan calon legislatif beridentitas Muslim. Sementara untuk wilayah pantai barat, hasil menunjukkan non-muslim banyak keluar sebagai pemenang dalam kontestasi politik elektoral tersebut. Relasi identitas keagamaan maupun etnik menjadi perekat dan semangat tersendiri bagi pemilih/konstituen selain politik uang dan politik patronase.

Kemenangan Eramas tentu kompatibel dengan apa yang digagas dan disampaikan olehnya ke publik

pada masa kampanye. Eramas dalam pemberitaan media lokal banyak dikonstruksikan sebagai calon pemimpin yang mewakili umat Islam. Misalnya saja citra Islam yang dibangun dengan memberikan mobil pembersih Mesjid dan Mushola, mendatangi pesantren, mengikuti agenda Sholat subuh berjamaah, mengunjungi makam penyebar Islam di Barus, mengunjungi pengajian ibu-ibu dan mengikuti Tausyiah Ustadz Abdul Somad. Eramas ingin menampilkan citra populis sebagai calon pemimpin yang peduli dengan kegiatan sosial-keagamaan. Selain itu, ada yang menarik dari sisi pemberitaan media lokal, seperti narasi yang termuat dalam kanal Waspada.co.id dengan judul pemberitaan “momen kedekatan Ijeck dengan anak-anak di Jabal Nor.” Yang dimaksud Jabal Nor disini adalah sekolah SD, tetapi tidak disebutkan di judul bahwa “jabal Nor” adalah sekolah. Maka sasaran yang ingin dibidik oleh Media kepada publik adalah citra ‘Jabal Nor’ sebagai tempat ibadah bagi umat muslim Waspada.co.id, 2018).

Home / Sumut / Moment Kedekatan Ijeck Dengan Anak-anak di Jabal Noor



(WOL Photo/Ist)

MOMENT KEDEKATAN IJECK DENGAN ANAK-ANAK DI JABAL NOOR

March 1, 2018 | Sumut | Leave a comment



MEDAN, WOL – Sekolah Islam Terpadu Jabal Noor menggelar Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) ke-4, Kamis (1/3) di Sei Mencirim, Kabupaten Deliserdang.

Tokoh Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara, H Musa Rajekshah hadir memenuhi undangan untuk membuka secara resmi Porseni tersebut.



Sumber: *Waspada.co.id* (01/03/2018)

Peran media, khususnya koran sangat besar memengaruhi jalannya pesta demokrasi di Sumut. Bahkan koran menjadi sarana penting untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan calon, baik itu kegiatan penting maupun tidak penting untuk konsumsi publik. Salah seorang tim pemenang Eramas mengakui bahwa media dibutuhkan untuk menggiring opini publik, dan ia mengakui media dibayar mahal untuk mengikuti setiap agenda calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur mengunjungi daerah-daerah.

Eramas di lain sisi juga diuntungkan dengan menyandang nomor urut 1. Pasalnya, mengacungkan jari telunjuk ke atas menjadi tanda bahwa ‘nomor satu itu Eramas’ dan simbol ketauhidan bagi umat Islam. Ini menambah satu *logic* bahwasanya Eramas wajib untuk didukung oleh umat Islam karena merepresentasikan umat Islam dengan menarik makna asosiatif yang hadir pada simbol jari telunjuk.

5.2 Pergulatan Narasi Islam Menjelang Pemungutan Suara

Ribuan massa dari berbagai daerah di Sumatera Utara berkumpul di lapangan Merdeka Medan untuk melakukan doa bersama bertajuk “*Doa Untuk Sumut Bermartabat*” pada 23 Juni 2018. Sebenarnya ini merupakan jatah kampanye akbar yang diberikan kepada Eramas oleh KPU untuk menyampaikan visi dan misinya. Tetapi kemudian pada 20 juni 2018 tim pemenang Eramas mengumumkan bahwa kampanye akbar diganti dengan agenda tausyiah. Hadir ketika itu tokoh nasional seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Temgku Zulkarnaen, Jendral Gatot Nurmantyo dan tokoh

muslim Sumut lainnya. Pidato Gatot Nurmantyo banyak berbicara mengenai isu kedaerahan (dengan balut nuansa keagamaan): 'Jangan pilih pemimpin yang tidak minum air Sumatera Utara, tidak makan makanan Sumatera Utara, dan tidak menghirup udara Sumatera Utara'. Ucapan yang begitu bersemangat membuat para jamaah doa bersama bersemangat sambil berteriak takbir 'Allah hu Akbar' (Sindonews.com, 23/06/2018). Sedangkan dalam tausyahnya, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa dirinya datang ke Sumut bukan sebagai pendatang, melainkan hanya pulang kampung dan mendoakan Eramas untuk meraih kemenangan saat pesta demokrasi di tanggal 27 Juni 2018. Ini sekaligus respon UAS terkait spanduk yang bertuliskan bahwa dirinya adalah seorang pendatang dan menyangkal hal tersebut dengan menunjukkan identitasnya sebagai warga Sumatera Utara. UAS mengingatkan agar jangan pilih pemimpin yang tidak takut kepada Allah SWT: *"Ya Allah jangan kau angkat pemimpin kami, yang tak takut kepadaMu dan tak sayang kepada kami ya Allah... di hujan yang deras ini kami meminta, berdoa kepadaMu berikanlah kami pemimpin yang adil ya Allah."* Selain tim pemenang Eramas, turut berpartisipasi ormas Islam dalam menyukseskan acara tersebut seperti BKPRMI, GNPf Ulama, Aliansi Gerakan Subuh, KAUMI dan banyak komunitas Islam lainnya.

Hadirnya Ustadz Abdul Somad, Tengku Zulkarnaen dan Gatot Nurmantyo mengindikasikan bahwa Eramas ingin merebut suara umat Islam. UAS yang terkenal dengan ceramah yang mudah dipahami ditambah dengan banyaknya orang yang mengidolakan dirinya tentu

mampu merebut perhatian sekaligus memengaruhi preferensi politik warga muslim Sumut. Hadirnya Tengku Zulkarnaen juga menjadi nilai tambah. Selain menjabat sebagai wakil sekjen Majelis Ulama Indoensia, Zulkarnaen merupakan tokoh Aksi Bela Islam 212 dan banyak melemparkan wacana tentang isu-isu populis sekaligus berperan sebagai pengkritik rezim Jokowi-JK dari sudut pandang religiusitas. Artinya, representasi gerakan Islam yang menuntut Ahok diadili sebagai konsekuensi penodaan agama, hadir secara tidak langsung dan membentuk makna yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Gatot Nurmantyo sebagai Purnawirawan Jendral TNI juga menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan yang menjangkarkan diri pada Aksi Bela Islam.

Gambar 1. *Pasca Tausyiah Sumut Bermartabat*



Sumber: Detik.com, 2018

Selain itu beredar pula foto Ijeck bertemu dengan Habieb Rizieq Shihab di media sosial saat Ijeck melakukan ibadah umrah. Terlepas apakah Eramas didukung Rizieq atau tidak, tetapi citra yang tampil didepan publik bahwasanya Eramas dekat dengan umat. Rizieq yang pernah sukses mengkomandoi Gerakan Aksi Bela Islam berjilid-jilid merupakan tokoh FPI yang populer ditengah kalangan

umat Islam di Indonesia dan mencuri banyak perhatian pada politik nasional. Salah satu tim sukses Eramas menyatakan bahwa memang terjadi pengadopsian pola strategi politik yang dimainkan oleh Anies-Sandi saat bertarung di Pilkada DKI 2017.

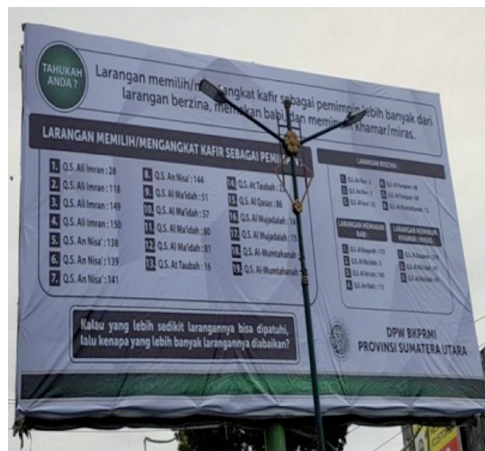
“Kita memang mengadopsi pola strategi yang dimainkan oleh Anies-Sandi waktu itu (Pilkada DKI 2017). Dan menurut kami itu sah. Masyarakat saat itu berduyun-duyun datang ke TPS karena kesamaan akidah. Dan itu positif, karena politik uang menjadi berkurang sekaligus kita berkontribusi menaikkan angka partisipasi pemilih..... Semangat umat Islam musti direalisasikan.... Sholat Subuh Berjamaah, Taushiyah Akbar dan serangkaian agenda keagamaan diciptakan sedemikian rupa, agar masyarakat muslim tertarik memilih. Dan itu sah-sah saja” (Wawancara, 20 Oktober 2018)

Memasuki masa tenang jelang pencoblosan Pilgub Sumut 2018, Minggu 24 Juni, spanduk larangan memilih pemimpin kafir bertebaran di beberapa jalan protokol Kota Medan dan juga di Mesjid Al-Jihad tepat di sebelah kantor Gubernur. Secara tersurat, spanduk-spanduk tersebut memang tidak mengacu kepada dua kontestan Pilkada Sumut sehingga Bawaslu tidak melakukan tindakan apapun secara hukum formal. Namun spanduk memilih pemimpin muslim dan larangan memilih kafir berkorelasi dengan imajinasi kolektif yang terbangun saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Djarot memang bukan non-muslim, tetapi publik mengaitkannya dengan Ahok, ditambah dengan Sihar yang non-muslim. Hegemoni wacana yang terus

dikonservasi membuat publik khususnya muslim lebih memilih Eramas ketimbang Djoss. Salah seorang narasumber dari Universitas ternama di Medan pada saat itu sangat yakin bahwa pertarungan Edy-Musa dengan Djarot-Sihar merupakan kelanjutan antara Anies-Sandi dan Ahok-Djarot dan mengasosiasikan pada gerakan ‘Kebangkitan Islam 212’.

“ini sama seperti di Jakarta. Islam tidak boleh diam dalam memilih pemimpin. Kita harus bersatu untuk memenangkan Eramas, tidak ada pilihan lain. Bedanya, kalau disini tidak ada Aksi Bela Islam. Tetapi saya yakin Djarot gak akan menang waktu itu, karena dia antek-antek PDIP, Jokowi dan Ahok.” (Wawancara, 13 Agustus 2018)

Gambar 2. Spanduk Seruan Memilih Pemimpin Islam



Sumber: Detik.com, 2018

Sholat Subuh Berjamaah yang banyak digagas di mesjid-mesjid menjelang pemungutan suara merupakan strategi sekaligus eforia umat Islam. Tausiyah dengan konten larangan memilih pemimpin kafir banyak didengungkan

setelah sholat subuh usai. Surah Al Maidah Ayat 51 menjadi konsumsi jamaah serta menyerukan agar ‘umat’ menggunakan hak pilihnya. Puncak dari Sholat Subuh Berjamaah adalah saat hari pemungutan 27 Januari 2018. Ini merupakan strategi Eramas agar umat Islam pergi ke TPS pasca sholat subuh untuk menggunakan hak suaranya. Salah satu pengurus masjid yang penulis wawancarai di Kecamatan Medan Johor mengungkapkan bahwa TPS sengaja didekatkan dengan Mesjid tempat terselenggaranya Sholat Subuh Berjamaah agar masyarakat memilih setelah sholat subuh yakni Eramas dan mengungkapkan bahwa Eramas harus menang agar umat Islam di Sumut tidak didiskriminasi.

“TPS sengaja di dekatkan dengan Mesjid tempat Sholat Subuh Berjamaah supaya orang-orang yang tadinya siap sholat dan mendengarkan ceramah mau untuk menggunakan hak suaranya. Kita enggak mau-lah Islam ini hancur dengan memilih (pemimpin) orang lain selain Islam. Edy kan dekat dengan ulama, maka kalau dia terpilih ulama akan aman dan enggak dipersekusi” (Wawancara, 11 Agustus 2018).

Gambar 3. Spanduk Sholat Subuh Berjamaah



Sumber: Koleksi pribadi, 2018

Kemenagan Eramas tentu tidak terlepas dari imajinasi yang terbentuk

pada gerakan Aksi Bela Islam 212, meskipun secara tidak langsung. Imajinasi kolektif kembali dibangkitkan seolah Pilkada Sumut merupakan kelanjutan ‘Jihad’ yang harus dilakukan untuk memenangkan pemimpin muslim. Hegemoni di ruang publik dibantu dengan konstruksi putra daerah bahwa Eramas merupakan representasi Sumut dengan mengambil garis demarkasi (*political frontier*) terhadap Djarot yang berasal dari Jakarta. Sentimen kedaerahan menjadi point pendukung yang tidak dapat dilepaskan begitu saja. Politik diferensiasi muncul dan menghasilkan dua kutub yang saling berposisi. Subjek seperti Ustadz Abdul Somad, Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo merupakan tokoh yang dilekatkan pro dengan umat Islam sekaligus idola bagi sebagian kalangan.

Narasi dan simbol Islam yang terus dipertontonkan didepan publik oleh Eramas pada masa kampanye menjadikan umat Islam yakin bahwa mereka merupakan pemimpin yang akan mengedepankan umat. Tentu konstruksi ini lebih mudah untuk dibentuk manakala lawan politik mereka selalu diidentikkan dengan narasi pelangi (Islam-Kristen). Artinya, pada kasus ini bermain logika perbedaan dan logika persamaan untuk menentukan posisi tiap-tiap subjek pemilih yang dikondisikan dalam pemahaman keagamaan.

Mitos yang dibangun ditengah masyarakat pun banyak berbicara tentang program-program keumatan. Ungkapan bahwa saat nanti Eramas terpilih maka Islam akan jaya, Islam akan eksis, dan tidak akan ada persekusi serta diskriminasi terhadap ulama banyak terdengar. Mulai dari anak muda sampai

orang tua mengakui bahwa Edy-ljeck merupakan sosok yang religius dan dekat dengan Islam serta ulama. Mitos ini hadir berkorelasi dengan lawan politiknya. Eramas lebih leluasa untuk dekat dengan kalangan Islam karena wacana publik mengkonstruksi lawan politik Eramas sebagai 'pelangi' yang berasosiasi dengan Ahok dan juga Jokowi sebagai rezim yang banyak dikritik dengan stereotipe anti Ulama. Maka Eramas berhasil melakukan hegemonisasi dan mengkondisikan pikiran masyarakat untuk bersandar pada agama saat memilih pilihan pada 27 Juni 2018.

Eramas berhasil memenangkan persetujuan dengan umat dan membuat kesepakatan secara diskursif. Tidak jarang wacana kelslaman berkorelasi dengan rezim pemerintahan Jokowi sehingga keyakinan memilih Eramas lebih tepat dibandingkan Djarot-Sihar (Djoss). Pasalnya, Jokowi diusung oleh PDIP mendapatkan stereotipe negatif dari kebanyakan umat Islam di Sumut. Kebijakan Jokowi yang tidak pro Islam seperti pembubaran HTI, wacana persekusi ulama dan dirasa anti Islam membuat kondisi politik nasional turun ke ranah politik daerah dengan mengkaitkan makna-makna tertentu sebagai dasar menentukan pilihan. Banyak kalangan warga muslim Sumut mengatakan mereka harus memilih yang lebih sedikit mudaratnya. Artinya, memilih Eramas adalah tepat karena menjauhkan mereka dari 'dosa' memilih pemimpin kafir. Antagonisme yang hadir di publik tidak ada korelasinya dengan program-program politik dan kebijakan kedepan. Publik dikondisikan agar terfokus melihat mereka hanya dalam dua faktor: kesamaan identitas berupa putra daerah dan seakidah.

5.3 Implikasi Etis Politisasi Agama

Politik identitas memang tidak bisa dibendung. Masyarakat selalu mencari titik terdekat dalam memilih pemimpin dalam sektor apapun. Agama sebagai bagian sensitif dan dianggap sebagai sesuatu yang *taken for granted* merupakan bentuk kepercayaan mutlak. Interpretasi agama tidak bisa terhindarkan dalam politik yang sekuler seperti demokrasi sekalipun. Ini merupakan konsekuensi politik yang harus diterima sebagai bentuk penghormatan terhadap pilihan masyarakat secara deliberatif (Hardiman, 2012: 100). Politik identitas bukan berarti tindakan yang selalu dianggap negatif atau berseberangan dengan demokrasi. Politisasi identitas berupa aksi-aksi kolektif juga merupakan jalan sah bagi kelompok-kelompok yang tersisih dari aspek sosial ekonomi dan politik untuk meraih kepentingannya, ketika saluran-saluran institusional kurang tersedia bagi mereka – ini yang disebut sebagai populisme Islam. Islam yang jumlahnya besar (mayoritas) tetapi merasa termarginalisasi (Hadiz, 2014: 121). Karena itu, Schlesinger (1998) menyarankan upaya kelompok-kelompok yang marginal harus diintegrasikan pada kelompok *mainstream* daripada terus merayakan perbedaan. Senada dengan itu, Huntington (1993) dalam *Class of Civilization* melihat bahwa perbedaan yang didominasi politik identitas yang sempit akan menghilangkan makna nasionalisme dan gagasan kebinekaan. Karena itu solusi yang bisa ditempuh yaitu menekankan kembali nilai-nilai kebangsaan.

Kemudian, elit politik harus menjadi 'agen sadar' menyemai diskursus. Publik sebagai konsumen informasi khususnya di

Indoensia masih memiliki daya filter yang rendah. Hoaks dan banalisasi kebohongan dari media sosial memantik kedangkalan berpikir di masyarakat. Era digitalisasi yang berhasil mengkoneksikan banyak orang untuk terintegrasi satu sama lainnya telah berhasil menggiring masyarakat kepada emosi massa dari *daring* (dalam jaringan) hingga *luring* (luar jaringan). Dengan mudah masyarakat terkena hoaks dan tergiring untuk membenci manakala perbedaan mencapai eskalasi yang paling tajam. Maksud dari 'agen sadar' adalah politisi dalam masa kampanye musti menyampaikan ide dan gagasan seputar programnya agar masyarakat lebih rasional dalam memilih atas dasar kebijakan publik. Artinya elit politik yang berkontestasi dalam hajatan demokrasi musti menggambarkan dan menjabarkan apa yang akan dilakukan kedepan sebagai pemimpin daerah.

Demokrasi sebagai wahana tindakan dalam istilah Claude Lefort (1988) haruslah menjadi sarana bagi semua mengartikulasikan semua. Demokrasi harus menjadi 'ruang kosong/penada kosong (*empty signifier*)' yang pada setiap warga negara bebas berekspresi. Tetapi, mengutip Mouffe, bahwa setiap gagasan yang dilemparkan ke publik mustilah bersifat publik pula, artinya yang dapat diterima bagi pluralitas kehidupan warga negara. Dengan demikian agama akan bersifat paradoks karena kehadiran agama di dalam politik sekuler seperti demokrasi memiliki implikasi yang rumit. Mayoritarianisme akan tumbuh seturut banyaknya agen politis menyandarkan politik dalam konteks keagamaan yang secara absolut diinterpretasikan dengan daya jangkauan yang ekstrem. Maka tidak heran apabila

tindakan sepihak, diskriminasi terhadap kaum marjinal, dan hambatan bagi kaum minoritas untuk berekspresi menjadi pemandangan yang akan terjadi apabila agama dikapitalisasi oleh politisi untuk memenangkan persetujuan demi keuntungan diri dan kelompoknya – seperti pada pilkada DKI 2017.

Karena upayanya yang bekerja di ranah kesadaran dan emosi masyarakat, politisasi identitas agama berpotensi mengganggu modal sosial dan lebih luas lagi bisa mengancam integrasi bangsa. Politik identitas pada dasarnya bersifat *self interest*, atau mengutamakan pencapaian kepentingan kelompoknya. Juga pembelahan sosial yang pada akhirnya justru memurangi peluang untuk mencapai tujuan bersama (*common good*). Akibat logika perbedaan, politik identitas akan cenderung menonjolkan perilaku yang bersifat *ingroup*, memonopoli kebenaran dan kepatuhan total pada konformitas kelompoknya (Vertigans, 2008: 52). Ketika politik identitas dimanipulasi oleh kepentingan elit politik, maka terdapat beberapa resiko yang dapat mengancam kehidupan demokrasi. Terlebih lagi, dalam keadaan heterogenitas etnik yang seringkali menjadi hambatan bagi konsolidasi demokrasi (Birni, 2007:61).

Pertama, politik identitas membentuk hierarki dalam kelompok-kelompok minoritas. Ketika tuntutan-tuntutan dari kelompok politik identitas dipenuhi elitnya semakin berani untuk meningkatkan tekanan terhadap para anggota kelompoknya dalam membela nilai-nilai tradisional di ruang publik. Sebaliknya, ketika tuntutan kelompok politik identitas tidak dipenuhi, mereka akan memicu "*cultural defensiveness*"

yang juga memperkuat elit-elit konservatif yang mendorong para anggota kelompok untuk menaati tanda-tanda identitas-identitas secara ketat demi melindungi kelompok dari tekanan atau ancaman pihak lain (Weinstock, 2006). Ini yang menyebabkan Djarot-Sihar tidak diterima oleh sebagian umat Islam Sumut akibat ada irisan identitas yang dipersepsikan akan mengancam identitas yang sudah mapan/mayoritas.

Kedua, resiko gerakan politik identitas dikooptasi oleh negara. Politik identitas menjadi obat darurat untuk menyelesaikan masalah sosial yang kritis termasuk rasisme, kemiskinan dan perampasan (*dispassession*). Dampaknya, kelompok akan menonjolkan sisi primordialisme dan aspek sakral secara berlebihan, dan meningkatkan stereotipe pada kelompok-kelompok lawannya. Para pejabat pemerintah cenderung dipengaruhi pandangan-pandangan stereotipe dalam memutuskan kebijakan atau perkara. Ketiga, komunitas demokratis akan dilemahkan karena orang-orang akan mengacu pada basis-basis yang membedakan mereka daripada menyatukan mereka. Modal sosial yang berbasis pada saling percaya sulit tercapai akibat fragmentasi etnik dan keagamaan. Keempat, identitas adalah pokok sulit untuk didialogkan secara rasional serta *non-negotiable*, sehingga berpotensi menciptakan *deadlock* dan konflik terbuka.

Sementara dalam konteks Sumatera Utara, kebijakan publik menjadi penting mengingat masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan potensi yang ada di Sumatera Utara. Dalam artian, Sumut harus memiliki sistem birokrasi

yang mampu melayani dengan cara transparan dan akuntabel. Tingkat persepsi korupsi harus diturunkan dan aspek pelayanan publik menjadi lebih dipermudah. Infrastruktur yang musti diremajakan adalah tugas yang harusnya menjadi prioritas, sehingga di ruang publik, kontestan berbicara dengan cara mengadu gagasan dan program-program unggulan. Efek politik identitas pada gelaran politik elektoral ditakutkan hanya mengakomodir kalangan tertentu saja. Sementara tugas seorang kepala daerah (pejabat publik) adalah melayani semua tanpa memandang identitas, latar belakang dan pilihan politik saat gelaran pesta demokrasi berlangsung.

6. Kesimpulan

Politik identitas menjadi strategi politik yang menjanjikan sebagai instrumen meraih suara selain politik uang. Pilkada DKI merupakan cerminan bagaimana politisasi identitas berbasiskan agama bermain dalam ruang-ruang publik dan lebih bersifat terbuka dengan memainkan isu agama sebagai narasi besar yang diangkat secara diskursif. Penodaan yang dilakukan Ahok telah menggerus kepercayaan publik terhadapnya terkhusus yang beragama Islam. Label penista yang disematkan kepadanya kemudian dikapitalisasi untuk kepentingan elektoral oleh lawan politiknya pada kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017. Strategi politik identitas kemudian diberlakukan untuk memenangkan Eramas di Sumut dengan pola yang hampir serupa. Djarot yang diasosiasikan dengan Ahok membuat sebagian publik tidak menerimanya, apalagi melihat pasangan Djarot yaitu Sihar Sitorus yang beragama Nasrani. Ruang publik dipenuhi oleh narasi

religiusitas dan ditambah dengan sentimen putra daerah.

Kemenangan Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2018 tidak terlepas dari pemanfaatan imajinasi kolektif yang pernah lekat dalam stereotipe umat Islam (Aksi Bela Islam 212). Hal ini terbukti dengan kemenangan Eramas pada basis daerah kabupaten/kota yang bermayoritaskan Agama Islam. Politisasi agama yang dilakukan Eramas melibatkan banyak unsur, mulai dari aktor/subjek/agensi seperti Ustadz Abdul Somad, Gatot Nurmantyo dan Tengku Zulkarnaen. Hingga mengkapitalisasi prosesi ibadah seperti sholat subuh berjamaah untuk menarik simpati warga muslim. Lalu, dengan memahami keadaan sosiologis masyarakat Sumut, Eramas mengubah

kampanye akbar menjadi bentuk tausyiah. *Tagline* 'Sumut Bermartabat' menjadi jargon dan ungkapan yang juga sangat merepresentasikan citra Edy dan Musa sebagai putra daerah dan militer (yang diketahui selalu berada dalam logic keumatan). Peran media massa seperti koran dan media sosial sangat memengaruhi suhu politik identitas yang terjadi di Sumut. Eramas yang dikonstruksikan sebagai calon gubernur yang bermarwah, dekat dengan umat dan tegas, mendapatkan maknanya ditengah diskursus publik. Kemenangan Eramas menjadi kelanjutan dari politik identitas yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, walaupun eskalasi konflik politiknya masih wajar, tetapi kontestan Pilkada Sumut masih menggunakan instrumen politik identitas sebagai alat perjuangan politik meraih suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, L. (2015). *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (Catatan-Catatan Investigasi)*. Jakarta: IndoPRORESS.
- Amindoni, A. (2018, Juni 26). *Politik Identitas ramai di Pilgub Sumatera Utara, isu korupsi jadi terabaikan?*. BBCNews.com. Diakses dari <https://www.bbc.com>
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terayang*. Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar.
- Aspinall, E. (2010). *Indonesia in 2009: Democratic Triumphsand Trails. Southeast Asian Affairs*, 103-125.
- Damanik, A. T. (2010). *Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam Ke Imajinasi Etno-Nasionalisme*. Jakarta: Friederich Elbert Stifftung (FES) & Aceh Future Institute (AFI).
- _____ (2015) *Medan, Sumatera Utara: Antara Politik Etnik dan Politik Uang dalam Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Gutmann, A. *Identity in Democracy*. (Oxfordshire: Pricenton University Press 2003).
- Hadiz, V. (2006). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haspirin, C,P (2015). *Politik Identitas: Geliat Sosial antara Aku dengan Yang Lain*. Jakarta. USU Press.
- Heryanto, A. (2015) *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Howarth, D. (2000). *Discourse*. St Edmunds: St Edmunds Burry Press.
- Huntington, S. P.(1993). *The Class of Civilizqations?Foreign Affairs*, 72(3), 22 <https://doi.org/10.2307/20045621>
- Hutagalung, D. (2008). *Hegemoni dan Demokrasi-Radikal Plural: Membaca Laclau dan Mouffe.*; Yogyakarta: Resist Book.
- Idris, M. (2018, Juni 10). *Gerakan Subuh Berjamaah: Strategi Menangkan Cagub Edy Rahmayadi*. detik.com. Diakses dari <https://news.detik.com>
- Jorgensen, P & Phillips, E. (2010). *Analisa Wacana Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kersten, C. (2018). *Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Laclau, E & Mouffe, C. (2008). *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Posmarxisme + Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Lay, C. (2006). *Involusi Politik, Esai-Esai Transisi Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Leandha, M. (2018, 06,08). *Soal Baliho, Yayasan Mesjid Al-Jihad Sebut Aneh Jika Ada yang tersinggung*. Kompas.com. Diakses dari: <https://regional.kompas.com>
- Nanda, R. (2018, Mei 2). *Edi Rahmayadi Ziarah ke Makam Mahligai*. Sumutpos.co. Diakses dari <https://sumutpos.co>
- Nurul, M. (2018, Februari 28) *Ke Tapteng, Edy Sempatkan Ziarah ke Penyebar Islam di Baru*. Tribun-Medan.com. Diakses dari <https://TribunMedan.com>

- Piliang, Y.A. (2005). *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Bandung: Jelasutra.
- Rahman, M. (2018, Juni 20). *Eramas Batalkan Kampanye Akbar, Ganti dengan Doa Bersama*. *Medanbisnisdaily.com*. Diakses dari <http://www.medanbisnisdaily.com>
- Rangkuti, L. (2018, 06, 23). *Ustaz Abdul Somad dan Tengku Zulkarnaen Doakan Eramas saat Kampanye Akbar*. *Sindonews.com*. Diakses dari <https://daerah.sindonews.com>
- Rangkuti, L. (2018, Juni 23). *Hujan Lebat Jadi Saksi Doa untuk Sumut Bermartabat*. *Okezone.com*. Diakses dari <https://news.okezone.com>
- Robet, R. (2010). *Manusia Politik: Subek Radikal dan Politik Emansipasi di Era Kapitalisme Global Menurut Slavoj Zizek*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Schleinger, A. M. (1998). *The Disuniting of America: Reflections on a Multicultural Society (Revised Edition)*. New York: W. W Norton & Company.
- Simon, R. (2004). *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar.
- Tamtomo, A. (2018,07,11). *Info Grafik: Peta Kemenangan Pilkada Sumatera Utara*. *Kompas.com*. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com>
- Utama, A (2018, 04,01). *Momen Kedekatan Ijeck dengan Anak anak di Jabal Nor*. *Waspada.co.id*. Diakses dari <http://waspada.co.id>
- Vertigans, S. (2008). *Militant Islam: A Sociology of Characteristics, cause and Consequences*. United Kingdom: Taylor & Francis.
- Warda, H. I. *Political Culture, Political Science, and Identity Politics: An Ueasy Alliance* (Asghate 2014).
- Weinstock, D. M. (2006). *The Real World of (Global) Democracy*. *Journal of Social Philosophy*, 37(1), 6–20.